

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN

Mulyadi¹

¹ Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author: ¹Mulyadi

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi informasi (X2), serta mekanisme pengawasan (X3) terhadap pencapaian kinerja anggaran yang berlandaskan prinsip *Value for Money*. Ketiga variabel tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan dalam memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di ranah sektor publik. Hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi empiris dalam membangun hipotesis serta sebagai pijakan bagi penelitian lanjutan terkait tata kelola keuangan negara.

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Anggaran, *Value for Money*



Introduction

Di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, instansi di sektor publik mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan kondisi dan dinamika tata kelola publik mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja serta efektivitas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pemerintahan yang berkinerja baik ditandai dengan kemampuan menghasilkan output yang konkret dan maksimal. Hasil kerja tersebut perlu selaras dengan tujuan strategis organisasi yang telah dirumuskan, sebab visi dan misi menjadi pedoman utama dalam setiap proses kerja yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional.

Sebagai entitas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menunjukkan kinerja optimal. Dalam realitas pelaksanaan di lapangan, masih banyak aparatur negara yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang ideal, seperti keterbukaan informasi, kejujuran dalam bertindak, serta tanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. Masalah seperti lambannya pelayanan publik serta keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan mencerminkan kelemahan tersebut. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah pun menurun. Salah satu faktor penyebabnya adalah pelaksanaan kinerja yang belum sepenuhnya mengikuti aturan dan standar operasional yang berlaku di tiap lembaga pemerintahan.

Konsep *good governance* pada dasarnya merujuk pada proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh berbagai pihak secara kolektif. Hal ini mencerminkan adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Menurut Mardiasmo dalam *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* (2006), tata kelola yang baik dalam sektor publik mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta supremasi hukum. Sementara itu, UNDP (United Nations Development Programme) juga menekankan bahwa *good governance* mencakup partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang dapat dipercaya dan berkelanjutan.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang menjadi titik perhatian dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis prinsip *Value for Money*.
2. Pengaruh Transparansi terhadap efektivitas kinerja anggaran berbasis prinsip *Value for Money*.
3. Pengaruh Pengawasan terhadap pencapaian kinerja anggaran berbasis prinsip *Value for Money*.

Literature Review

Kinerja Anggaran Value For Money

Pemerintah pusat telah memberikan sebagian hak pengaturannya kepada pemerintah daerah, terutama dalam menyusun rencana, melaksanakan program pembangunan, serta mengelola keuangannya sendiri. Lewat kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk merancang pembangunan dan mengatur fiskalnya secara independen. Meski demikian, semua kegiatan tersebut tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi melalui sistem penganggaran APBD yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kinerja anggaran adalah hasil dari serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi terhadap kinerja ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran tahun berjalan dengan hasil pada periode anggaran sebelumnya. Selaras dengan hal ini,

Mardiasmo (2009) sebagaimana dikutip oleh Safitri dan Mildawati (2019) menyebutkan bahwa pendekatan *value for money* menjadi acuan dalam menilai kinerja anggaran, dengan memperhatikan tiga indikator utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pendekatan *value for money* merupakan suatu strategi manajerial dalam sektor pemerintahan yang fokus pada pemanfaatan sumber daya secara optimal melalui tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015). Ketiga dimensi ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah dana publik telah digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal.

1. Ekonomi

Aspek ini menekankan pentingnya memperoleh input atau sumber daya dengan biaya paling rendah tanpa mengorbankan mutu. Idealnya, barang dan jasa diperoleh dengan harga kompetitif yang sesuai dengan nilai pasar.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam konteks ini mengacu pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Sebuah proses dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan keluaran maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin.

3. Efektivitas

Sementara itu, efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditentukan sejak awal. Dengan kata lain, suatu program dikategorikan efektif apabila mampu menghasilkan output yang benar-benar selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas

Istilah “akuntabilitas” berakar dari kata dalam bahasa Inggris *accountability*, yang secara luas diartikan sebagai bentuk tanggung jawab. Konsep ini merujuk pada keadaan di mana individu maupun institusi memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memberikan penjelasan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang telah diambil dalam menjalankan tugasnya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban, baik secara etis maupun administratif, dari pihak yang diberikan mandat (agen) untuk menyampaikan laporan, memberikan penjelasan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada pihak pemberi mandat (prinsipal), yang memiliki hak untuk melakukan evaluasi serta meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sulistoni (2010) menyampaikan bahwa pemerintahan yang menjalankan prinsip akuntabilitas dapat dikenali melalui sejumlah indikator penting, di antaranya:

1. Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi penyelenggaraan administrasi publik secara transparan, cepat, dan akurat.
2. Kualitas pelayanan publik yang mencerminkan respons terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan diberi ruang secara terbuka.
4. Setiap keputusan dan kebijakan publik dikomunikasikan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Tersedianya sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sebagai bagian dari kontrol sosial. Melalui mekanisme ini, publik dapat menilai keberhasilan program-program pemerintah secara objektif.

Transparansi

Mardiasmo (2009) transparansi dalam pemerintahan diartikan sebagai keterbukaan dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik, khususnya mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin akses publik terhadap informasi penting, termasuk laporan keuangan dan data lainnya yang relevan. Hal ini memungkinkan

pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Meutiah (2008) menyatakan bahwa inti dari prinsip transparansi adalah tersedianya kebijakan yang terbuka, terutama bagi pihak yang melakukan pengawasan. Informasi dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui keterbukaan informasi ini, diharapkan dapat terbentuk suasana politik yang kondusif, mendorong terciptanya saling menghormati antar pihak, serta menghasilkan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Prinsip keterbukaan ini terdiri dari dua aspek utama: pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur antara pemerintah dan masyarakat; kedua, adanya jaminan hak publik untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu, transparansi dapat diartikan sebagai prinsip dasar yang menjamin akses publik terhadap informasi mengenai proses pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga evaluasi hasilnya.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator utama yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan, antara lain:

1. Bersifat Informatif

Pemerintah harus menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, baik berupa berita, data, prosedur, maupun fakta yang relevan, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Arus informasi ini penting agar para pemangku kepentingan dapat memahami mekanisme yang berjalan dalam proses pemerintahan.

2. Adanya Keterbukaan

Prinsip transparansi menjamin hak publik untuk mendapatkan akses terhadap informasi milik negara. Informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah idealnya bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikategorikan terbatas berdasarkan regulasi hukum yang berlaku.

3. Transparansi dalam Pengungkapan

Pemerintah perlu menyampaikan laporan kepada publik mengenai kegiatan dan kinerja keuangan secara jujur dan terbuka. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai dan memantau pelaksanaan tanggung jawab pemerintah secara langsung.

Pengawasan

Dalam kerangka manajerial, pengawasan memiliki peran strategis sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap rencana organisasi dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan awal. Pengawasan juga menjadi penopang penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi jalannya program. Oleh karena itu, dalam berbagai bentuk organisasi, termasuk negara sebagai lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan, penerapan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi sangat krusial (Busro, 2018). Busro juga menekankan bahwa agar birokrasi maupun organisasi dapat berjalan dengan baik, fungsi pengawasan harus diterapkan secara optimal. Jika aspek ini diabaikan, maka secara perlahan dapat memicu kerusakan atau bahkan kegagalan total pada sistem organisasi tersebut.

Pengawasan, yang merupakan bagian penting dari proses manajerial, perlu disusun dan diterapkan melalui pendekatan yang sistematis dan terarah. Tanpa adanya pengawasan yang terstruktur dan konsisten, pelaksanaan program atau rencana kerja yang telah disusun akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Fernandes dan Hanif (2015) mengidentifikasi bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni kualitas perencanaan dan penyusunan kebijakan, efektivitas dalam implementasi dan pengendaliannya, serta akuntabilitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Dewi & hadiprajitno (2023)	Menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi informasi, serta pengawasan memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran yang berlandaskan prinsip <i>Value for Money</i>	Sama-sama menyoroti pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja anggaran berbasis <i>Value for Money</i>	Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam fokus pembahasan
2	Sitta et al (2023)	Menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memberi dampak signifikan terhadap Kinerja anggaran berkonsep Value For Money	Terdapat kesamaan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran	Tidak ditemukan perbedaan dengan fokus artikel ini.
3	Safitri & Mildawati (2019)	Menyebutkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta partisipasi berdampak positif terhadap Kinerja anggaran berkonsep Value For Money	Sama dalam mengkaji variabel akuntabilitas dan pengawasan	Tidak melibatkan ketepatan waktu dan partisipasi sebagai bagian dari variabel penelitian
.4	Hawa & Fitriasuri (2024)	Meneliti pengaruh akuntabilitas, pengawasan, dan komitmen organisasi terhadap Kinerja anggaran berkonsep Value For Money	Sama-sama meneliti pengaruh akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja anggaran.	Tidak memasukkan unsur komitmen organisasi sebagai variabel penelitian
5	Satriani (2022)	Mengkaji bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan, ketepatan waktu, dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja anggaran berkonsep Value For Money	Kesamaan terletak pada variabel akuntabilitas dan pengawasan yang diteliti	Tidak melibatkan ketepatan waktu dan partisipasi sebagai bagian dari variabel penelitian

6	Pramita et al (2024)	Menunjukkan bahwa selain akuntabilitas, transparansi, pengawasan, partisipasi, juga pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja anggaran berkonsep Value For Money	Sama dalam menyoroti akuntabilitas dan pengawasan sebagai variabel utama	Artikel ini tidak mencakup partisipasi dan pemahaman akuntansi sebagai variabel yang dianalisis
---	----------------------	--	--	---

Method

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik kajian literatur sebagai sumber utama pengumpulan data (*library research*), yakni pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan teori-teori yang relevan dari berbagai sumber literatur. Informasi yang dihimpun berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil-hasil riset terdahulu, yang kemudian dianalisis dan dikonstruksi sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2016), studi pustaka adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada penggalian informasi dari referensi-referensi ilmiah yang mengandung nilai-nilai sosial, norma, serta budaya dalam konteks objek kajian. Pendekatan ini penting sebagai fondasi teoritis dalam proses penelitian ilmiah karena memberikan kerangka berpikir yang sistematis.

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam studi ini bersumber dari dokumen dan publikasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Results and Discussion

Berdasarkan tinjauan teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, fokus pembahasan dalam artikel literature review ini yang berada dalam ruang lingkup Manajemen Keuangan Negara meliputi tiga aspek utama, yaitu:

Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja anggaran yang mengacu pada pendekatan *Value for Money*.

Akuntabilitas memainkan peran vital dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta pelaksanaan pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, pengelolaan anggaran dapat berlangsung secara lebih optimal, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kinerja organisasi, khususnya di sektor publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan bermutu. Tidak hanya itu, akuntabilitas juga menjadi alat penting dalam sistem pengendalian untuk memastikan bahwa output dari pelayanan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sitta et al., 2023).

Lebih lanjut, akuntabilitas berperan besar dalam mendukung pelaksanaan kinerja anggaran yang berorientasi pada prinsip *value for money*. Semakin baik tingkat pertanggungjawaban yang dijalankan oleh instansi pemerintah, maka semakin besar pula kemungkinan tercapainya pengelolaan anggaran yang optimal. Dalam kerangka penerapan anggaran berbasis *value for money*, akuntabilitas menjadi elemen kunci guna menjamin bahwa penggunaan anggaran negara berjalan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip ekonomi (Sari et al., 2021).

Pengaruh Transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis prinsip *Value for Money*.

Transparansi dibangun atas dasar ketersediaan informasi yang independen, keterbukaan dalam prosedur pemerintahan, serta akses terhadap lembaga dan data yang relevan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Informasi yang disampaikan harus akurat, mudah dipahami, dan memungkinkan untuk diawasi oleh publik (Rigian & Sari, 2019).

Kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki peranan strategis dalam menentukan sejauh mana anggaran dapat dijalankan secara efektif. Semakin terbuka akses informasi terkait kebijakan ini bagi masyarakat, maka kinerja pengelolaan anggaran pun cenderung semakin baik. Transparansi memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih peka dan kritis terhadap berbagai peristiwa di lingkungannya. Di samping itu, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Sitta et al., 2023).

Transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kinerja anggaran. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, proses penyusunan anggaran menjadi lebih inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan ini turut mendorong terciptanya efisiensi, efektivitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hasil ini sejalan dengan temuan sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh (Rigian & Sari, 2019), (Sitta et al., 2023)

Pengaruh Pengawasan terhadap pencapaian kinerja anggaran yang mengedepankan prinsip *Value for Money*.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses mengamati kejadian yang sedang berlangsung dan membandingkannya dengan standar atau kondisi ideal yang diharapkan. Melalui pengawasan, potensi penyimpangan dapat dikenali lebih awal dan segera dikoreksi. Oleh karena itu, pengawasan berperan sebagai bentuk mekanisme kontrol. Kehadiran sistem pengawasan yang efektif mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip *value for money* (Sitta et al., 2023).

Pengawasan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, merupakan langkah untuk meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Fungsi ini bersifat preventif agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengawasan langsung umumnya dilakukan secara individual melalui proses observasi, penelaahan, identifikasi, dan pemeriksaan secara mandiri, misalnya melalui kegiatan inspeksi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dijalankan melalui aktivitas pemantauan atau monitoring secara berkelanjutan (Dandy et al., 2021).

Lebih lanjut, fungsi pengawasan yang diterapkan secara optimal turut memberikan dampak positif terhadap realisasi anggaran, terutama dalam konteks penerapan prinsip *value for money*. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Suci & Rohman (2023), Dewi & Hadiprajitno (2023), serta Batubara & Risna (2020), yang secara konsisten menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan identifikasi permasalahan, pemaparan teori yang mendasari, temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, serta hasil analisis hubungan antarvariabel, maka alur pemikiran dalam artikel ini dapat dirancang dan dituangkan melalui *conceptual framework* sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

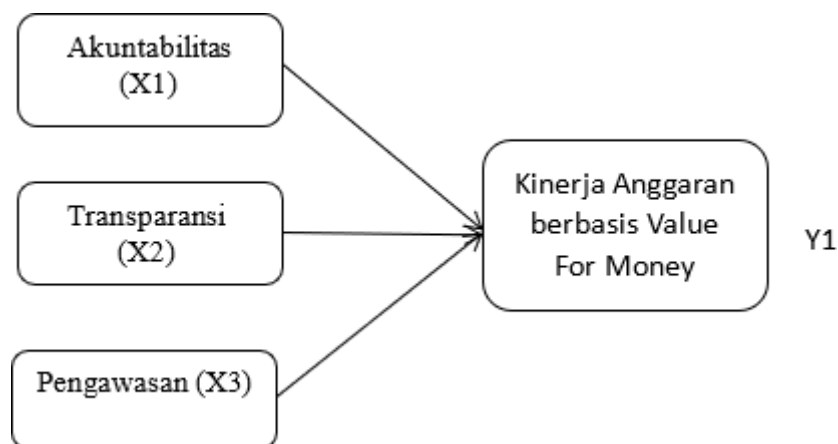


Figure 1. Kerangka Konseptual

Dengan mempertimbangkan landasan pemikiran tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa tiga elemen kunci yakni tanggung jawab (akuntabilitas), keterbukaan informasi (transparansi), dan fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan anggaran yang mengedepankan pencapaian hasil optimal sesuai dengan prinsip *value for money*.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa pencapaian kinerja anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, karena masih terdapat faktor lain yang juga berpotensi memengaruhinya. Terdapat sejumlah faktor lain yang juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian kinerja anggaran secara keseluruhan diantaranya:

- a) Komitmen organisasi
- b) Partisipasi (Satriani, 2022) (Pramita et al., 2024)
- c) Ketepatan waktu (Satriani, 2022)
- d) Pemahaman akuntansi (Pramita et al., 2024)

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian teori, pembahasan, dan literatur terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja anggaran yang berbasis Value for Money. Semakin tinggi kualitas pertanggungjawaban yang dimiliki oleh institusi, maka semakin optimal pula pengelolaan keuangan publik secara efisien dan tepat sasaran.
2. Transparansi berperan signifikan dalam memperbaiki tata kelola anggaran melalui kemudahan akses informasi, keterlibatan publik, serta terbukanya proses pengawasan terhadap kebijakan anggaran.
3. Pengawasan menjadi elemen penting dalam menjamin pelaksanaan anggaran yang akurat, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Acknowledgement

Sebagai penutup, saran yang dapat disampaikan melalui artikel ini adalah pentingnya memperluas ruang kajian terhadap variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja anggaran berbasis value for money. Beberapa variabel yang patut dipertimbangkan dalam penelitian lanjutan meliputi komitmen organisasi, partisipasi, ketepatan waktu, serta pemahaman akuntansi. Kajian

lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di sektor publik.

References

- Dandy, M. P., Armaini dan Sopiyan, R., Kinerja Anggaran, A., Dandy Pratama, M., Armaini, R., Akuntansi, J., & Negeri Sriwijaya, P. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Konsep Value For Money. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/IFINANCE.V7I1.8419>
- Pramita, Y. D., Filiana, I., & Maharani, B. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 171–184. <https://doi.org/10.30596/21867>
- Sari, P., Hanum, N., & Salman, M. (2021). DETERMINAN KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY PADA SEKTOR PUBLIK (Studi pada SKPD Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(5), 294–303. <https://doi.org/10.33059/JMAS.V2I5.4202>
- Satriani, A. I. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Ketepatan Waktu, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) DI KOTA SEMARANG.*
- Sitta, B., Paulus, D., & Hadiprajitno, T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41638>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media. Fernandes,
- Dewi, B. S., & Hadiprajitno, P. T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–7. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo, M. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement System And Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 4(3), 373-395.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Meutiah Ganie Rochman. 2000. *Perubahan Pemerintahan: Good governance*
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota surabaya. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 8(3), 1–22.

[Http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jir a/article/view/2441](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jir a/article/view/2441)

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods).Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2017. (n.d.). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 18 September 2017. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. (n.d.). Pengelolaan Keuangan Daerah. 09 Desember 2005 Lembar Negara 2005 Nomor 40. Jakarta

Suci, R. C. E., & Rohman, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–15.

W., Kennedy, K., & Hanif, R. A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).